BAB I
PENDAHULUAN

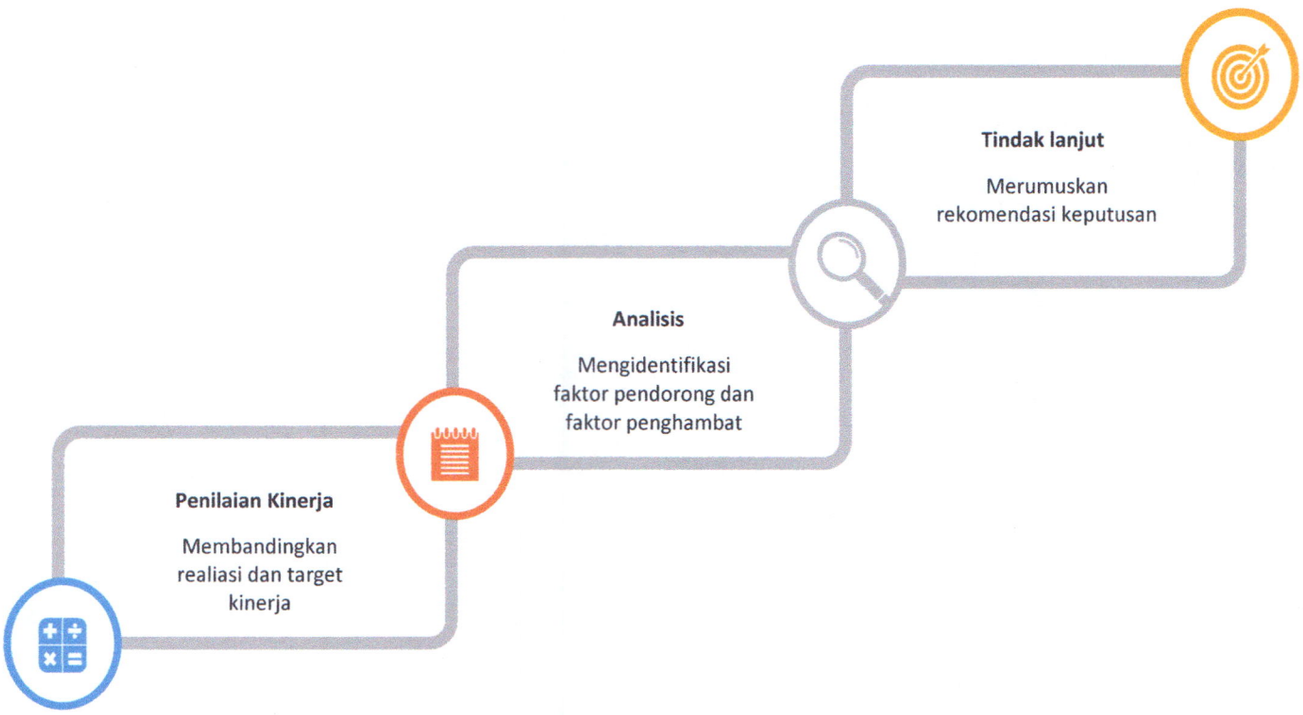
I.1. Latar Belakang

Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah merupakan suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah, serta menilai realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Untuk mengetahui pencapaian target kinerja pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, perlu dilakukan evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 Tribulan IV bulan Oktober s/d Desember , melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2025 guna menjamin rencana yang telah ditetapkan dapat mencapai target kinerja tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 diharapkan diperoleh data dan informasi penilaian target kinerja tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, serta Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah. Dari penilaian kinerja tersebut dapat diidentifikasi faktor pendorong dan penghambat pencapaian target kinerja, serta merumuskan tindak lanjut kebijakan yang akan diambil guna mengoptimalkan pencapaian target kinerja, dengan kerangka evaluasi sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka Evaluasi Renja Perangkat Daerah



Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, diolah.

Dengan demikian hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tribulan IV Tahun 2025 dapat memberikan gambaran efektifitas penetapan rencana, relevansi, dampak serta keberlanjutan program pembangunan daerah terhadap permasalahan dan isu penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, serta masukan perbaikan kebijakan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah di masa yang akan datang melalui umpan balik dan *lesson-learned* peningkatan akuntabilitas kinerja.

I.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2022.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
6. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 18 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 10 Tahun 2022.

I.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dilaksanakan evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 adalah menilai capaian target kinerja target kinerja tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, serta Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.

Tujuan dilaksanakan evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 adalah:

1. Mengidentifikasi factor- faktor pendorong dan penghambat pencapaian target kinerja.
2. Merumuskan tindak lanjut kebijakan yang akan diambil guna mengoptimalkan pencapaian target kinerja

I.4. Sistematika Penulisan

Evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 disajikan dalam sistematika sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN, menguraikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan, dan metode evaluasi Renja Perangkat Daerah.
2. BAB II CAPAIAN KINERJA RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN IV TAHUN 2025 menjelaskan capaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, serta capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah.
3. BAB III FAKTOR PENDORONG DAN FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA, menjelaskan faktor pendorong dan faktor penghambat pencapaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, serta faktor pendorong dan faktor penghambat pencapaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah
4. BAB IV PENUTUP, menguraikan kesimpulan dan tindak lanjut.

I.5. Metode Evaluasi Renja Perangkat Daerah

Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 menggunakan metode evaluasi pengukuran kinerja dengan pendekatan *gap analysis*, metode ini dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja (apa yang sudah dicapai) dengan target kinerja (apa yang harus dicapai), perbandingan tersebut merupakan rasio capaian target kinerja yang dinyatakan dalam % (persentase). Dari keseluruhan capaian target kinerja dilakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

Tabel 1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

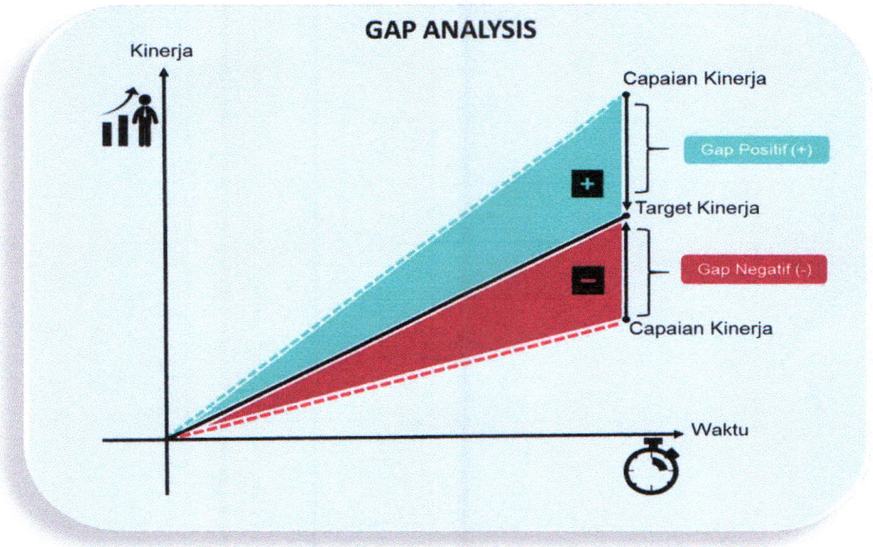
No.	Interval Nilai Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian Capaian Kinerja
1.	≥ 91%	Sangat Tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi, gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal penilaian kinerja.
2. Hasil sedang, gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.
3. Hasil rendah dan sangat rendah, gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Pendekatan *gap analiysis* dalam evaluasi pengukuran kinerja ini membandingkan antara capaian kinerja dengan target kinerja. *Gap* dapat terjadi apabila capaian kinerja berbeda dengan target kinerja, atau hasil yang dicapai selama pelaksanaan berbeda dengan hasil yang diharapkan dalam perencanaan, sebagaimana tergambar berikut:

Gambar 2. *Gap Analysis* Antara Capaian Kinerja Dengan Target Kinerja



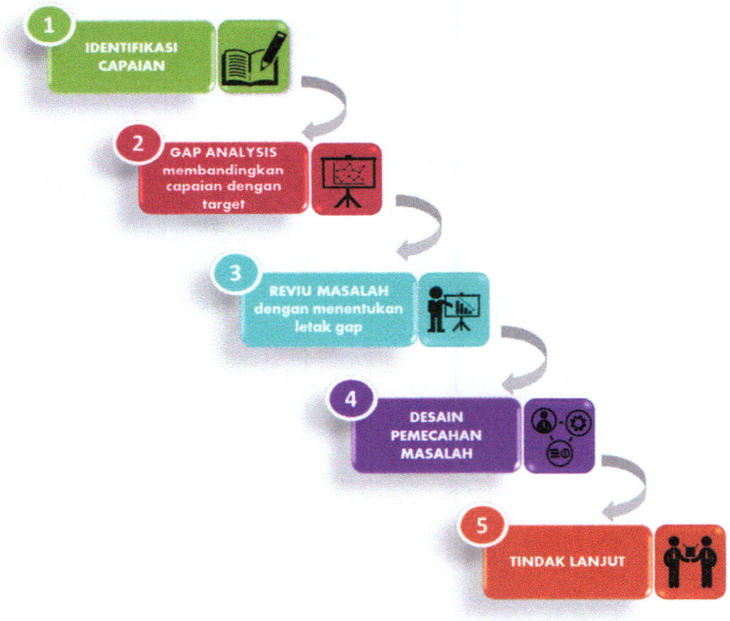
Gap antara capaian kinerja dengan target kinerja dapat bernilai positif (+) maupun negatif (-). *Gap* bernilai positif (+) jika capaian kinerja lebih besar dari target kinerja, sebaliknya *gap* akan bernilai negatif (-) jika capaian kinerja lebih kecil dari target kinerja.

Pendekatan *gap* analysis atau analisis kesenjangan bermanfaat untuk:

1. Menilai tingkat kesenjangan antara capaian kinerja dengan target yang ditetapkan.
2. Mengetahui tingkat peningkatan kinerja yang diperlukan untuk menutup kesenjangan tersebut.
3. Menjadi salah satu dasar pengambilan keputusan terkait prioritas waktu dan biaya yang dibutuhkan

Langkah-langkah yang dilakukan dalam *gap analysis*:

1. Identifikasi kondisi aktual dan capaian kinerja.
2. Melakukan analisis kesenjangan dengan membandingkan capaian kinerja dengan target kinerja.
3. Reviu permasalahan faktor pendorong dan faktor penghambat dengan menggunakan statistik deskriptif, yaitu dengan melakukan analisis permasalahan berdasarkan besar atau kecilnya *gap*.
4. Menyusun desain pemecahan masalah apabila *gap* bernilai negatif
5. Menentukan tindak lanjut yang diperlukan.



Dalam rangka memberikan informasi yang kredibel dan bermanfaat maka evaluasi Renja Perangkat Daerah harus didukung oleh data dan informasi yang akurat dan *up to date*. Mekanisme pengumpulan data menggunakan penelaahan dokumen, data survei yang dilakukan secara mandiri oleh Perangkat Daerah maupun lembaga lain yang berkompeten, seperti BPS, lembaga riset dan sebagiannya.

Sedangkan dalam Penilaian Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas diukur dengan menggunakan skala 1-5 dengan kreteria sebagai berikut :

Kriteria Penilaian Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas

	Rentang Nilai	Kategori
1.	0,00 - 20,00	Buruk
2.	20,01 - 40,00	Kurang Baik
3.	40,01 - 60,00	Cukup baik
4.	60,01 - 80,00	Baik
5.	80,01 - 100	Sangat Baik

Dari skala penilaian tersebut diatas maka akan dapat ditarik kesimpulan

1. Pengukuran IPKKU telah menjadi alat evaluasi Kinerja yang sistematis dan terukur dalam melihat bagaimana pemerintah daerah menyelenggarakan urusan ketentraman dan ketertiban umum, khususnya melalui kinerja Satpol PP dalam Penegakan Perda/Perkada dan Penyelenggaraan Trantibumtranmas.
2. Pengukuran IPKKU di daerah memberikan gambaran objektif kinerja Trantibum namun masih menyisakan tantangan dari aspek kapasitas, komitmen, dan integrasi data . Kedepan IPKKU perlu diperkuat sebagai alat kendali pembangunam daerah yang aman, tertib, dan berdaya saing tinggi.
3. IPKKU sebagai instrument penilaian konkrit Kinerja Satpol PP yang harus dijadikan landasan utama penelaian yang tergambarkan dalam RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah sebagai dasar dalam penentuan angaran.

BAB II

CAPAIAN KINERJA RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN IV TAHUN 2025

II.1. Capaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Capaian kinerja Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 disajikan sebagaimana tabel berikut:

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kinerja Tahun 2025		
				Target	Realisasi	Capaian
	Meningkatnya Ketentraman dan Keteriban Umum serta pelindungan masyarakat		Nilai Indeks PKKU	61	68	111
			Nilai Indeks Satlinmas	61	64	104
		Meningkatnya penanganan gangguan trantibum	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100	100	100
		Meningkatnya Penegakan Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100	100	100

Analisis capaian kinerja Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025, merupakan hasil pelaksanaan program /kegiatan bulan Oktober sampai dengan Desember 2025. Capaian kinerja yang diukur pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk dijelaskan sebagai berikut :

1. Sasaran strategis meningkatnya penanganan gangguan trantibum dengan indikator kinerja Prosentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan dengan Formulasi penghitungan :

   Jumlah Gangguan trantibum yang diselesaikan
   ——————————————————————X 100%
   Jumlah gangguan Trantibum

   menggambarkan seberapa besar Penanganan Gangguan Trantibum Tahun 2025 yang diselesaikan . Pada Triwulan IV Tahun 2025, gangguan Trantibum ditargetkan 100 % terealisasi 100 % sehingga capaian kinerja pada sasaran satu di Tribulan IV satu 100 %.

2. Sasaran meningkatnya Penegakan Perda dan Perkada dengan indikator kinerja persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan dengan formulasi penghitungan :

   Jumlah perda dan perkada yang ditegakan
   —————————————————————— X 100%
   Jumlah perda dan perkada yang memuat sangsi

   menggambarkan seberapa besar Penanganan Penegakan Perda dan Perkada yang ditegakkan . Pada Triwulan IV Tahun 2025, Penegakan Perda yang dapat ditegakkan sebanyak 100 terealisasi 100 % sehingga capaian kinerja pada sasaran dua di Tribulan IV satu 100 %.

II.2. Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

No.	Program	Indikator	Kinerja Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**	**85**	**78,50**	**87**
	Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu**	**11 dok**	**11 dok**	**100 %**
	Penyusunan Dukumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dok	5 dok	83 %
	Koordinasi dan Penyusunan Dukumen RKA SKPD	Jumlah Dukumen RKASKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD	1 dok	1 dok	100 %

No.	Program	Indikator	Kinerja Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian
	Koordinasi dan Penyusunan Dukumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dok	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capain Kinerja dan iktisar realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	1 dok	100%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 dok	2 dok	100%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Penatausahaan yang disusun secara tepat waktu**	**72 do**	**70 dok**	**97 %**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52 orang	50 orang	96 %
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Dokumen	2 Dok	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/tribulan/semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulana/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	18 Laporan	18 dok	100 %
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Darrah		**-**	**-**	**Recofusing**
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	Recofusing
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia**	**171**	**171**	**100 %**
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4 Paket	4Paket	100 %
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	3 Paket	3 Paket	100 %
	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	3 Paket	3 Paket	100 %

No.	Program	Indikator	Kinerja Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian
	Penyediaan bahan bacaan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan Peraturan Perundang –Undangan yang disediakan	1 Dok	1 Dok	100 %
	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan tamu	36Lap	36 lap	100 %
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	108 Laporan	108 Laporan	100 %
	Penatausahaan arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinas Pada SKPD	7 Dok	7 dok	100 %
	Kegiatan Pengadaan barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan**	**0**	**0**	Recofusing
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	-	-	Recofusing
	Pengadaan Mebel		-	-	Recofusing
	Pengadaan peralatan dan mesin lainya	Jumlah Unit Peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	0	0	Recufusing
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dibayarkan tepat waktu**	**5 jenis**	**5 Jenis**	**100 %**
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1laporan	1 laporan	100 %
	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	jumlah Lporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Listrik yang disediakan	2laporan	2laporan	100%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	2 lap	2 lap	100%
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah dan Jenis barang milik daerah dalam kondisi baik**	**39 unit**	**39 unit**	**100 %**
	Penyediaan jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	1 Unit	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36 Unit	36 unit	100 %

No.	Program	Indikator	Kinerja Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian
	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung/kantor yang terawatt	2	2	100 %
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban umum yang tertangani**	**1854 dok**	**1854**	**100 %**
	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten	**Jumlah Kasus gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang tertangani**	**1744**	**1744**	**100 %**
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	9 dok	9 dok	100 %
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tersedianya Dokumen yang memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertertiban Umum	44 dok	44 dok	100 %
	Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan dalam teknik Pencegahan Kejahatan	454 dok	452 dok	100 %
	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Tersedianya Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	11 dok	11 dok	100 %
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP fungsional dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja	-	-	Recufusing
	Peningkatan Kapaditas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat		-	-	Recofusing

No.	Program	Indikator	Kinerja Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Jumlah laporan penindakan gangguan trantibum berdasarkan perda dan perkaa melalui penertiban dan penangganan unjuk rasa dab kerusuhan masa	-	-	Recofusing
	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini Cegah Dini Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli Pengamanan dan Pengawalan	Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini Pembinaan dan Penyuluhan Pelaksanaan Patroli Pengamanan terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengamanan dan Pengawalan	500 lap	500 lap	100 %
	Penindakan Gangguan Ketentraman an Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan unjuk rasa dan Kerusuhan massa yang dilakukan Penindakan	90 lap	90 lap	100 %
	Penyediaan Layanan alam rangka dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah layanan penyediaan layanan dampak penegakan Perda dan Perkada yang terlayani	25 lap	0	0 %
	Pengadaan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum yang tersedia	1 unit	1	100 %
	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	**Jumlah Pelanggaran Perda yang tetangani**	**99**	**99**	**100%**

No.	Program	Indikator	Kinerja Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian
	Pembinaan dan penyuluhan terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggaran Peratura Kepala Daerah	2 laporan	2	100 %
	Penyelidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	20 laporan	20	100 %
	Dukungan pelaksanaan sidang atas pelanggaran peraturan daerah	Jumlah Perkara yang dapat disidangkan	-	-	Recofusing
	Pemberkasan Administrasi penyidik oleh PPNS penegak Perda	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyelidikan atas Pelanggaran Perda	-	-	Recofusing
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada masyarakat/Kelompok masyarakat/Pelaku Usaha	5 laporan	5	100%
	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/walikota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan	22 laporan	22	100 %
	Pengawasan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	46 laporan	46	100 %
	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	**Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)**	-	-	**recofusing**
	Pembentukan secretariat PPNS	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS	-	-	recofusing

No.	Program	Indikator	Kinerja Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian
	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	-	-	recofusing
	Pembentukan PPNS penegak perda	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	-	-	recofusing
	Dukungan Operasional sekretariat PPNS	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	-	-	recofusing
	Pengembangan Kapasitas dan karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapitas Pejabat PPNS Penegak Perda	-	-	recofusing

Dalam Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan sasaran Meningkatnya Penanganan gangguan Trantibum dan Meningkatnya Penegakan Perda dan Perkada dengan outcome Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah maka dapat dijelaskan beberapa Sub Kegiatan yang mendukung Program tersebut diatas:

1. **Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** indikator Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun sebanyak 16 dokumen antara lain:

- Dokumen LKjIP
- Dokumen LPPD
- Dokemen LKPJ
- Dokumen Renja 2026
- Dokumen Perubahan Renja 2025
- Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi TB I
- Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi TB II
- Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi TB III
- Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi TB IV
- Dukumen SPM
- Dokumen SAKIP
- Dokumen PUG
- Renstra 2025-2030
- Dokumen Laporan Keuangan
- Dokumen Laporan Tribulan
- Dokumen Evaluasi Internal

2. **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** , dengan Indikator Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjungan ASN yaitu sebanyak 53 0rang , Dokumen administrasi Gaji dan Tunjangan ASN Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk.
3. **Administrasi Umum Perangkat Daerah** dengan dengan Indikator , Jumlah Paket Peralatan Perlengkapan Kantor yang disediakan, Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan, Jumlah Paket Komponen instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan, Jumlah Paket barang cetakan dan Penggandaan yang disediakan, Jumlah dokumen Bahan Bacaan Perundang undangan, Fasilitasi Kunjungan Tamu, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD serta Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD
4. **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** dengan Indikator Jumlah Unit Peralatan dan mesin lainnya yang disediakan,Jumlah Paket Meble yang disediakan, Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan
5. **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** dengan Indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrikyang disediakan, Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan, Jumlah Laporan Penyediaan Jasa surat menyurat.
6. **Pemeliharaan barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan** dengan Indikator Jumlah Kendaraan dinas Operasional/Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya, Jumlah Asset tetap lainnya yang dipelihara, Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara atau direhabilitasi, Jumlah sarana prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara atau direhabilitasi, Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara, Jumlah meble yang dipelihara.

Dalam Pelaksanaan Tugas yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk mendukung 2 Sasaran yang ingin dicapai didudukung oleh :

Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan A : Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam satu (1) Daerah Kabupaten /Kota dengan menyesuaikan anggaran recufusing sesuai dengan Keputusan Presiden No 1 Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Sub Kegiatan :

1. Koordinasi penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota, kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan Koordinasi Trantibum Kabupaten/Kota yang ada Di wilayah Provinsi Jawa Timur serta Satpol PP Provinsi untuk meningkatkan Penyelenggaran Trantibum di Daerah, Kegiatan ini di anggarkan Rp. 5.591.250,- dan teralisasi Rp. 5.514.250 ,- atau sekitar 98,62 %

2. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka Peningkatan SDM Linmas di Tingkat Kecamatan peserta dari masing masing Desa di seluruh kecamatan .Dianggarkan sebesar Rp. 66.271.300,- dan teralisasi Rp. 66.085.000,- atau sekitar 99,72 %.
3. Kerjasama Antar Lembaga dan kemitraan dalam teknik Pencegahan dan Penanganan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka kemitraan dengan Dinas Samping Polres, Kodim , Kejaksaan, CPM untuk menjaga Penanganan Gangguan Trantibum. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1.311.166.350,- dan teralisasi Rp. 1.303.812.215,- atau sekitar 97,70 %.
4. Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Kententraman Masyarakat kegiatan ini dilaksanakan untuk melaksanakan Kegiatan Lembur Pembuatan SOP Trantibum dan Penegakan Perda. Kegiatan ini dianggarakan sebesar RP. 3.500.000,- dan terealisasi Rp3.199.000,-atau sekitar 91,40 %
5. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP Fungsional dan uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan SDM Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka Penjenjangan Karier. (Recufusing)
6. Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan Perpindahan jabatan ke jabatan Fungsional Pol PP , Promosi dan kenaikan Jenjang Jabatan. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung Karier bagi fungsional Satpol PP yang sudah memenuhi persyaratan untuk pengalihan jabatan Fungsional yang lebih tinggi. Kegiatan ini di anggarkan sebesar Rp. 14.460.000,- dan terealisasi 0 atau sekitar 0 % (Kegiatan tidak dapat terlaksana dikarenakan berdasarkan hasil koordinasi dengan Satpol PP Provinsi diketahui bahwa tahun 2025 ini belum terdapat jadwal kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan Perpindahan Jabatan ke Jabatan Fungsional Pol PP.)
7. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan SDM Satuan Perlindungan Masyarakat dalam rangka membantu ketentraman dan ketertiban Umum yang ada di masyarakat , serta penanggulangan bencana. (Recufusing)
8. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Satpol PP dan Satlinmas Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan Kapasitas SDM Satpol PP dan Satlinmas dalam rangka Pengamanan Ketentraman dan Ketertiban Umum. (Recufusing)

9. Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui deteksi dini cegah dini, Pembinaan, Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli dan Pengamanan kegiatan ini dilaksanakan untuk antisipasi Ketentraman dan Ketertiban umum dengan kegiatan Patroli Wilayah di daerah rawan gangguan trantibum yang ada dikabupaten Nganjuk, serta Pengamanan dan Pengawalan Bupati dan Pejabat Negara lainnya serta pengamanan asset Daerah, dan Pembayaran Gaji Tenaga Kontrak. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 665.900.300,- terealisasi sebesar Rp 621.490.830,- atau sekitar 93,33%
10. Penindakan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban Unjuk rasa dan kerusuhan massa. Kegiatan ini dilaksanakan untuk Penertiban dan Pelanggaran Perda yang ada di masyarakat sesuai dengan SOP dan tugas Pokok fungsi Satpol PP, serta kegiatan unjuk rasa dan kerusuhan massa yang berpotensi menggangu Ketentraman dan Ketertiban Umum . Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 88.611.500,- teralisasi sebesar Rp. 83.391.500,- atau sekitar 94,11 %.
11. Penyediaan Layanan dalam rangka dampak Penegakan Perda
    Kegiatan ini dilaksanakan untuk Pemberian bantuan kepada warga yang terdampak akibat dari Penegakan Hukum, Radius 50 m dari tempat kejadian Penegakan Perda. Di di anggarkan sebesar Rp. 2.500.000,- dan teralisasi Rp. 0 atau 0 % (Kegiatan ini tidak terealisasi karena tidak ada warga Negara yang terdampak akibat hokum penegakan Perda dan Perkada)
12. Pengadaan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum Kegiatan ini dilaksanakan untuk memenuhi sarana dan prasarana trantibum dimana Satuan Polisi Poamong Praja sebagai garda terdepan Penegakan Perda masih banyak sapras yang belum sesuai dengan amanat Permendagri No 121 Tahun 2018 tentang STANDAR TEKNIS MUTU PELAYANAN DASAR SUB URUSAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM. Dianggarkan sebesar Rp. 119.829.000 dan teralisasi Rp.114.298.197,- atau 95,38 %.

Kegiatan B : Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota

Sub Kegiatan :

1. Pembinaan dan Penyuluhan terhadap pelanggaran Peraturan Derah dan Peraturan Kepala Daerah kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan Pembinaan serta Penyuluhan kepada masyarakat pelanggar perda, pada waktu pelaksanaan operasi Pelanggaran Perda berlangsung. Kegiatan ini di anggarkan sebesar Rp. 5.060.000 dan terealisasi Rp. 5.040.000 atau 99,60 %.
2. Penyelidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah kegiatan ini dilaksanakan untuk pemberkasan pelanggaran Perda , Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 10.000.000,- dan terealisasi 10.000.000 atau 100 %..

3. Dukungan pelaksanaan sidang atas pelangaran Peraturan Daerah kegiatan ini dilaksanakan untuk pemberkasan penyidikan kepada masyarakat pelanggar Perda yang akan diberikan saksi. (Recufusing)
4. Pemberkasan administrasi penyidik pegawai oleh PPNS Penegak Perda kegiatan ini di laksanakan untuk untuk melakukan lembur dalam rangka pemberkasan kepada warga masyarakat pelanggar Perda. (Recufusing)
5. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan wawasan dan pemahaman kepada warga masyarakat ketentuan perundang-undangan baik tentang Ketertiban, Kebersihan, Keindahan (K3) . Kegiatan ini di anggarkan sebesar Rp. 332.041.850,- dan terealisasi 318.569.200,- atau 95,94 %
6. Penanganan Atas Pelanggaran Kepatuhan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota
   Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka Penangan Pelanggaran Peraturan Daerah yang dilakukan oleh Pelanggar Perda. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 588.555.000,- terealisasi Rp. 585.296.222,- atau sekitar 99,45 %.
7. Pengawasan atas kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
   Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberiakan Pengawasan Kepada masyarakat Pelanggar Perda atau Badan Usaha, sehingga tidak lagi muncul kegiatan yang sama dengan pelaku yang sama. Dianggarkan sebesar Rp. 39.257.800,- dan teralisasi sebesar Rp. 39.250.000,- atau sekitar 99,98 %

Kegiatan C : Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Sub Kegiatan :

1. Pembentukan secretariat PPNS kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung Pelaksanaan kegiatan Pelanggaran Perda yang dilakukan oleh masyarakat (Recufusing)
2. Kerjasama antar lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah
   Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka kemitraan dengan Dinas luar PPNS Penegak Perda. (Recufusing)
3. Pembentukan PPNS Penegak Perda kegiatan ini dilaksanakan untuk bimbingan Teknis PPNS Penegak Perda . (Recufusing)
4. Dukungan Operasional secretariat PPNS kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan dukungan Operasional PPNS . (Recufusing)
5. Pengembangan kapasitas dan karier PPNS kegiatan ini dilaksanakan untuk mengembangkan kapasitas PPNS. (Recufusing)

BAB III

FAKTOR PENDORONG DAN FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA

III.1. Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah

Analisis Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut:

No.	Tujuan/Sasaran	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
	Tujuan : Meningkatnya Ketentraman dan Keteriban Umum serta pelindungan masyarakat Sasaran : 1. Meningkatnya Penanganan gangguan trantibum 2. Meningkatnya Penegakan Perda dan Perkada	1. Tersedianya Dukungan Anggaran dari APBD 2. Adanya Regulasi daerah yang sesuai dengan situasi dan kondisi daerah terkait dengan tugas pokok dan fungsi 3. Peningkatan Kapasitas dan Jumlah anggota Satpol PP 4. Tersedianya Sarana dan Prasarana yang memadai	1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan Peraturan Daerah dan penciptaan Ketentraman dan Ketertiban 2. Belum adanya regulasi yang kuat sesuai dengan situasi dan kondisi daerah terkait dengan tugas pokok dan fungsi

III.2 Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Pencapaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

Analisis Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Tujuan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan disajikan dalam table berikut :

No.	Program	Indikator	Kinerja Tahun 2025				
			Target	Realisasi	Capaian	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	2	3	4	5	6	7	8
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**	**90**	**78.50**	**87**		
	Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu**	**11 dok**	**11 dok**	**100 %**		
	Penyusunan Dukumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dok	5 dok	83 %	Adanya Koordinasi dengan Perangkat Daerah pengampu perencanaan	
	Koordinasi dan Penyusunan Dukumen RKA SKPD	Jumlah Dukumen RKASKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD	1 dok	1 dok	100 %	Adanya Koordinasi dengan Perangkat Daerah pengampu perencanaan	
	Koordinasi dan Penyusunan Dukumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dok	100%	Adanya Koordinasi dengan Perangkat Daerah pengampu perencanaan	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capain Kinerja dan iktisar realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	1 dok	100%		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 dok	2 dok	100%		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Penatausahaan yang disusun secara tepat waktu**	**72 do**	**70 dok**	**97 %**		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52 orang	50 orang	96 %		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Dokumen	2 Dok	100%		

No.	Program	Indikator	Kinerja Tahun 2025				
			Target	Realisasi	Capaian	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	2	3	4	5	6	7	8
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/tribulan/semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulana/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	18 Laporan	18 dok	100 %		
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Darrah		-	-	**Recofusing**		
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	Recofusing		
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia**	**171**	**171**	**100 %**		
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4 Paket	4Paket	100 %	Adanya ketersediaan barang dan jasa serta penyedia barang dan jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	3 Paket	3 Paket	100 %		
	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	3 Paket	3 Paket	100 %		
	Penyediaan bahan bacaan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan yang disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %		
	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan tamu	36Laporan	36 lap	100 %		
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	108 Laporan	108 Laporan	100 %	Tersedianya sarana dan prasarana rapat koordinasi	Peserta rapat koordinasi dan konsultasi tidak melaporkan hasil rapat
	Penatausahaan arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinas Pada SKPD	7 Dok	7 dok	100 %		
	Kegiatan Pengadaan barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan**	**0**	**0**	**0 %**		
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	-	-	Recofusing		

No.	Program	Indikator	Kinerja Tahun 2025				
			Target	Realisasi	Capaian	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pengadaan Mebel		-	-	Recofusing		
	Pengadaan peralatan dan mesin lainya	Jumlah Unit Peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	0	0	Recufusing		
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dibayarkan tepat waktu**	**5 jenis**	**5 Jenis**	**100 %**		
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1laporan	1 laporan	100 %		
	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	jumlah Lporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Listrik yang disediakan	2laporan	2laporan	100%		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	2 lap	2 lap	100%		
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah dan Jenis barang milik daerah dalam kondisi baik**	**39 unit**	**39 unit**	**100 %**	**Adanya Anggaran Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	
	Penyediaan jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	1 Unit	100%		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36 Unit	36 unit	100 %		
	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung/kantor yang terawatt	2	2	100 %		
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban umum yang tertangani**	**1854 dok**	**1854**	**100 %**	Tersedianya anggaran dari APBD	
	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten	**Jumlah Kasus gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang tertangani**	**1744**	**1744**	**100 %**		

No.	Program	Indikator	Kinerja Tahun 2025				
			Target	Realisasi	Capaian	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	2	3	4	5	6	7	8
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	9 dok	9 dok	100 %		
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tersedianya Dokumen yang memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertertiban Umum	44 dok	44 dok	100 %		Belum semua Anggota Linmas dapat tersasar kegiatan tsb dikarenakan terbatasnya Anggaran
	Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan dalam teknik Pencegahan Kejahatan	454 dok	452 dok	100 %		
	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Tersedianya Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	11 dok	11 dok	100 %		
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP fungsional dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja	-	-	Recufusing		
	Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan Fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan		2 orang	2 orang	0 %		Kegiatan tidak dapat terlaksana dikarenakan berdasarkan hasil koordinasi dengan Satpol PP Provinsi diketahui bahwa untuk tahun 2025ini belum terdapat jadwal kegiatan peningkatan kapasitas
	Peningkatan Kapaditas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat		-	-	Recofusing		

			Target	Realisasi	Capaian	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	2	3	4	5	6	7	8
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Jumlah laporan penindakan gangguan trantibum berdasarkan perda dan perkaa melalui penertiban dan penangganan unjuk rasa dab kerusuhan masa	-	-	Recofusing		
	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini Cegah Dini Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli Pengamanan dan Pengawalan	Jumlah Laporan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini Cegah Dini Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli Pengamanan dan Pengawalan yang dilaksanakan	500 lap	500 lap	100 %	Dukungan Anggaran APBD	Belum semua Wilayah di Kabupaten Nganjuk dapat dilakukan Patroli Wilayah
	Penindakan Gangguan Ketentraman an Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan unjuk rasa dan Kerusuhan massa yang dilakukan Penindakan	90 lap	90 lap	100 %	Dukungan Anggaran APBD	
	Penyediaan Layanan alam rangka dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah layanan penyediaan layanan dampak penegakan Perda dan Perkada yang terlayani	25 lap	0	0 %	Dukungan Anggaran APBD	Tidak ada warga Negara yang terdampak akibat hokum penegakan Perda dan Perkada
	Pengadaan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum yang tersedia	1 unit	1	100 %		
	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	**Jumlah Pelanggaran Perda yang tetangani**	**99**	**95**	**100%**	Tersedianya Anggaran pada APBD	
	Pembinaan dan penyuluhan terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggaran Peratura Kepala Daerah	2 laporan	2	100 %		
	Penyelidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	20 laporan	20	100 %		

No	Program	Indikator	Kinerja Tahun 2025				

			Target	Realisasi	Capaian	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	2	3	4	5	6	7	8
	Dukungan pelaksanaan sidang atas pelanggaran peraturan daerah	Jumlah Perkara yang dapat disidangkan	-	-	Recofusing		
	Pemberkasan Administrasi penyidik oleh PPNS penegak Perda	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyelidikan atas Pelanggaran Perda	-	-	Recofusing		
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada masyarakat/Kelompok masyarakat/Pelaku Usaha	5 laporan	5	100%		Belum semua masyarakat dan pelaku usaha tersasar kegiatan sosialisasi Penegakan Perda
	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/walikota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan	22 laporan	22	100 %	Tersedianya Anggaran pada APBD	
	Pengawasan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	46 laporan	46	100 %	Tersedianya Anggaran pada APBD	
	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	**Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)**	**-**	**-**	**recofusing**		
	Pembentukan secretariat PPNS	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS	-	-	recofusing		
	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	-	-	recofusing		
	Pembentukan PPNS penegak perda	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	-	-	recofusing		
	Dukungan Operasional sekretariat PPNS	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	-	-	recofusing		
	Pengembangan Kapasitas dan karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapitas Pejabat PPNS Penegak Perda	-	-	recofusing		

PENUTUP

IV. Kesimpulan

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil pengukuran kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk Tribulan IV Tahun 2025 tujuan, sasaran telah sesuai dengan renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan secara umum Satuan Polisi Pamong Praja telah melaksanakan tugas menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah,meyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat.

Untuk Penyerapan pada tahun 2025 secara total anggaran Rp. 11.553.916.060 terealisasi 9.976.706.157 atau sekitar 86,35 % , untuk anggaran barang dan jasa terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 200.793.769 karena terdapat efisiensi melalui e Katalog Versi 6, dan sisa anggaran silfa gaji tahun 2025 Rp. 1.376.416.134 Jadi seluruh sisa Anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 1.577.209.903

Sasaran

1. Meningkatnya penanganan gangguan trantibum dengan Indikator Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan ditargetkan 100 %, dan TB IV teralisasi 100 % sehingga Capaian Kinerja pada TB IV 100 %
2. Meningkatnya Penegakan Perda dan Perkada dengan Indikator Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan ditargetkan 100 % dan TB IV terealisasi 100% sehingga capaian Kinerja pada TB IV 100 %

IV.2 Tindak Lanjut

Untuk selanjutnya sesuai hasil rapat anggaran TAPD dan banggar untuk Silfa Gaji dipergunakan untuk perekrutan tenaga Pengamanan

IV.3 Rekomendasi

Untuk Penganggaran tahun berkiutnya agar diperhitungakan sesuai dengan kebutuhan pegawai yang ada .

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
					I			II			III			IV										
1	4	8			9			10			11			12			13			14=7+13			15=14/6		16
		K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	**2.234**		**11.553.916.060**	**195**		**1.312.124.374**	**354**		**2.603.698.654**	**470**		**2.955.215.008**				**1.049**		**9.976.706.157**	**11.950**		**22.758.422.432**	***6186,90***	***53,95***	**Satuan Polisi Pamong Praja**
1	***PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA***	***380***	***Nilai***	***8.277.847.710***	***74***	***Nilai***	***1.135.718.644***	***90***	***Nilai***	***2.014.543.159***	***123***	***Nilai***	***1.693.187.448***	***161***	***Nilai***	***1.976.412.092***	***264***	***Nilai***	***6.820.759.743***	***523***	***Nilai***	***13.887.070.934***	***561,46***	***42,89***	***Satuan Polisi Pamong Praja***
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**72**	**Dokumen**	**7.127.071.000**	**45**	**Dokumen**	**1.034.410.345**	**45**	**Dokumen**	**1.760.424.854**	**63**	**Dokumen**	**1.429.729.635**	**57**	**Dokumen**	**1.526.044.032**	**70**	**Dokumen**	5.750.608.866	143	**Dokumen**	**11.569.847.709**	**198,61**	**159,71**	**Satuan Polisi Pamong Praja**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	52	orang/bulan	7.118.939.000	45	orang/bulan	1.034.410.345	45	orang/bulan	1.760.424.854	50	orang/bulan	1.426.646.635	50	orang/bulan	1.521.041.032	50	orang/bulan	5.742.522.866	103	orang/bulan	11.551.573.709	194,34	159,85	Satuan Polisi Pamong Praja
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	2	Laporan	4.020.000	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	0	2	Laporan	3.987.000	2	Laporan	3.987.000	4	Laporan	8.948.000	400,00	95,93	Satuan Polisi Pamong Praja
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	18	Laporan	4.112.000	0	Laporan	-	0	Laporan	-	13	Laporan	3.083.000	5	Laporan	1.016.000	18	Laporan	4.099.000	36	Laporan	9.326.000	200,00	106,13	Satuan Polisi Pamong Praja
	Perencanaan Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**11**	**Dokumen**	**18.700.000**	**6**	**Dokumen**	**5.496.000**		**Dokumen**	**5.820.000**	**3**	**Dokumen**	**6.179.000**	**0**	**Dokumen**		9	**Dokumen**	18.393.400	22	**Dokumen**	55.241.400	**137,50**	**45,99**	**Satuan Polisi Pamong Praja**
	Penyusunan Dukumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	Dokumen	8.856.000	2	Dokumen	2.320.000	2	Dokumen	3.040.000	1	Dokumen	2.832.000	0	Dokumen	658.400	5	Dokumen	8.850.400	11	Dokumen	13.965.400	157,14	20,70	Satuan Polisi Pamong Praja
	Koordinasi dan Penyusunan Dukumen RKA SKPD	1	Dokumen	2.928.000	1	Dokumen	888.000	1	Dokumen	480.000	1	Dokumen	1.495.000	0	Dokumen	-	1	Dokumen	2.863.000	2	Dokumen	9.462.500	200,00	37,04	Satuan Polisi Pamong Praja
	Koordinasi dan Penyusunan Dukumen Perubahan RKA SKPD	1	Dokumen	1.704.000	0	Dokumen	-	1	Dokumen	1.400.000	0	Dokumen	0	0	Dokumen	240.000	1	Dokumen	1.640.000	2	Dokumen	7.482.000	200,00	84,83	Satuan Polisi Pamong Praja
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0	Dokumen	0	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	0	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	1	Dokumen	2.292.000	0,00	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
					I			II			III			IV										
1	4	8			9			10			11			12	13			14=7+13			15=14/6		16
		K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	0	Dokumen	0	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	0	Dokumen -	0	Dokumen	-	1	Dokumen	2.292.000	0,00	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	Laporan	2.276.000	2	Laporan	1.596.000	2	Laporan	630.000	0	Laporan	0	0 Laporan -	2	Laporan	2.226.000	4	Laporan	7.711.500	80,00	87,14	Satuan Polisi Pamong Praja
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	2.936.000	1	Laporan	692.000	1	Laporan	270.000	1	Laporan	1.852.000	0 Laporan -	1	Laporan	2.814.000	2	Laporan	12.036.000	40,00	158,01	Satuan Polisi Pamong Praja
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**86**	**Paket**	-	-	**Paket**	-		**Paket**	-	**0**	**Paket**	**0**	**Paket** -	0	**Paket**	-	0	**Paket**	-	**0,00**	**0,00**	**Satuan Polisi Pamong Praja**
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	86	Paket	-	0	Paket	-	0	Paket	-	0	Paket	0	0 Paket -	0	Paket	-	0	Paket	-	0,00	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**162**	**Paket**	**344.620.910**	**14**	**Paket**	**30.556.750**	**36**	**Paket**	**100.540.950**	**41**	**Paket**	**87.287.154**	**80 Paket 120.811.906**	171	**Paket**	339.196.760	306	**Paket**	832.418.800	**153,77**	**40,84**	**Satuan Polisi Pamong Praja**
	Penyediaan komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4	Paket	7.182.660	0	Paket	-	2	Paket	3.709.800	1	Paket	2.150.000	1 Paket 1.196.580	4	Paket	7.056.380	8	Paket	15.021.380	114,29	100,88	Satuan Polisi Pamong Praja
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3	Paket	92.747.550	2	Paket	10.117.000	1	Paket	42.300.600	3	Paket	21.571.404	3 Paket 17.484.576	3	Paket	91.473.580	6	Paket	188.515.120	120,00	68,16	Satuan Polisi Pamong Praja
	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	3	Paket	9.359.700	0	Paket	1.095.750	1	Paket	1.953.250	1	Paket	2.232.750	1 Paket 4.077.250	3	Paket	9.359.000	6	Paket	19.288.500	120,00	88,40	Satuan Polisi Pamong Praja
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1	Dokumen	2.400.000	1	Dokumen	392.000	1	Dokumen	588.000	1	Dokumen	784.000	1 Dokumen 588.000	1	Dokumen	2.352.000	6	Dokumen	4.704.000	75,00	94,52	Satuan Polisi Pamong Praja
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	36	Laporan	24.200.500	2	Laporan	1.890.000	0	Laporan	-	4	Laporan	2.700.000	30 Laporan 19.570.000	36	Laporan	24.160.000	71	Laporan	46.382.500	100,00	81,04	Satuan Polisi Pamong Praja
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	108	Laporan	200.510.750	9	Laporan	17.062.000	27	Laporan	47.283.300	28	Laporan	54.535.000	44 Laporan 77.895.500	108	Laporan	196.775.800	186	Laporan	541.696.800	87,74	66,80	Satuan Polisi Pamong Praja
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7	Dokumen	8.219.750	0	Dokumen	-	4	Dokumen	4.706.000	3	Dokumen	3.314.000	0 Dokumen -	7	Dokumen	8.020.000	14	Dokumen	16.810.500	127,27	61,26	Satuan Polisi Pamong Praja
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**5**	**Jenis**	**0**	**0**	**Jenis**	-	**0**	**Jenis**	-	**0**	**Jenis**	**0**	**0 Jenis -**	**0**	**Jenis**	**0**	2	**Jenis**	91.150.000	**50,00**	**2,22**	**Satuan Polisi Pamong Praja**
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2	Unit	0	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	0	0 Unit -	0	Unit	-	2	Unit	91.150.000	200,00	66,52	Satuan Polisi Pamong Praja

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
					I			II			III			IV										
1	4	8			9			10			11			12				13			14=7+13			15=14/6		16
		K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1	Unit	0	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	0	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0,00	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	Pengadaan Mebel	2	Paket	0	0	Paket	-	0	Paket	-	0	Paket	0	0	Paket	-	0	Paket	-	0	Paket	-	0,00	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**5**	**Laporan**	**205.652.000**	**3**	**Laporan**	**11.954.799**		**Laporan**	**26.508.560**	**4**	**Laporan**	**19.788.838**	**4**	**Laporan**	**116.220.163**	**11**	**Laporan**	174.472.360	16	**Laporan**	333.835.997	**228,57**	**53,01**	**Satuan Polisi Pamong Praja**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	3.000.000	0	Laporan	-	1	Laporan	1.200.000	1	Laporan	1.200.000	1	Laporan	600.000	1	Laporan	3.000.000	2	Laporan	5.993.500	200,00	100,79	Satuan Polisi Pamong Praja
	Penyediaan jasakomunikasi sumberdaya air dan listrik	2	Laporan	73.000.000	2	Laporan	10.954.799	2	Laporan	9.308.560	2	Laporan	9.838.838	2	Laporan	12.354.523	2	Laporan	42.456.720	4	Laporan	90.229.029	66,67	46,29	Satuan Polisi PamongPraja
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2	Laporan	129.652.000	1	Laporan	1.000.000	1	Laporan	16.000.000	1	Laporan	8.750.000	1	Laporan	103.265.640	2	Laporan	129.015.640	4	Laporan	237.613.468	80,00	78,46	Satuan Polisi Pamong Praja
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**39**	**Unit**	**581.803.800**	**6**	**Unit**	**53.300.750**	**9**	**Unit**	**121.248.795**	**12**	**Unit**	**150.202.821**	**20**	**Unit**	**213.335.991**	**3**	**Unit**	**538.088.357**	34	**Unit**	1.004.577.028	**75,56**	**41,82**	**Satuan Polisi Pamong Praja**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1	Unit	83.086.800	1	Unit	12.310.272	1	Unit	15.936.934	1	Unit	19.254.802	1	Unit	33.103.207	1	Unit	80.605.215	2	Unit	141.412.898	200,00	82,21	Satuan Polisi Pamong Praja
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	36	Unit	419.538.100	3	Unit	33.247.128	6	Unit	84.508.061	9	Unit	104.798.569	17	Unit	156.457.834		Unit	379.011.592	#VALUE!	Unit	720.898.780	#VALUE!	86,82	Satuan Polisi Pamong Praja
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2	Unit	79.178.900	2	Unit	7.743.350	2	Unit	20.803.800	2	Unit	26.149.450	2	Unit	23.774.950	2	Unit	78.471.550	4	Unit	142.265.350	80,00	69,48	Satuan Polisi Pamong Praja
	Pemeliharaan Aset Tetap lainnya	0	Unit	0	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	0	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0,00	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	***1.854***	***persen***	***3.276.068.350***	***121***	***persen***	***176.405.730***	***264***	***persen***	***589.155.495***	***347***	***persen***	***1.262.027.560***	***30***	***persen***	***1.128.357.629***	***785***	***persen***	***3.155.946.414***	***11427***	***persen***	***8.871.351.498***	***11427,00***	***90,48***	***Satuan Polisi Pamong Praja***

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
					I			II			III			IV										
1	4	8			9			10			11			12				13			14=7+13			15=14/6		16
		K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	
2	**Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten**	**1.744**	**Kasus**	**2.301.153.700**	**106**	**Kasus**	**163.430.730**	**264**	**Kasus**	**501.279.495**	**320**	**Kasus**	**678.461.110**		**Kasus**	**854.619.657**	**690**	**Kasus**	2.197.790.992	**1127**	**Kasus**	6.362.816.119	**103,87**	**69,19**	**Satuan Polisi Pamong Praja**
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	9	Dokumen	5.591.250		Dokumen		3	Dokumen	2.123.000	2	Dokumen	1.231.250	4	Dokumen	2.160.000	9	Dokumen	5.514.250	12	Dokumen	15.196.750	80,00	9,21	Satuan Polisi Pamong Praja
	Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melaui deteksi dini dan cegah dini Pembinaan Penyuluha Pelaksanaan Patroli Pengamanan dan Pengawalan	500	Laporan	665.900.300	75	Laporan	99.823.460	131	Laporan	173.985.190	107	Laporan	142.531.280	180	Laporan	205.150.900	493	Laporan	621.490.830	549	Laporan	1.471.268.782	68 6,25	41,56	Satuan Polisi Pamong Praja
	Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	90	Laporan	88.611.500	13	Laporan	12.509.600	9	Laporan	8.849.800	25	Laporan	24.487.000	38	Laporan	37.545.100	85	Laporan	83.391.500	203	Laporan	123.078.500	172,03	30,77	Satuan Polisi Pamong Praja
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	44	Dokumen	66.271.300	0	Dokumen	0	3	Dokumen	4.800.000	27	Dokumen	40.450.000	14	Dokumen	20.835.000	44	Dokumen	66.085.000	63	Dokumen	2.030.995.000	23,16	369,27	Satuan Polisi Pamong Praja
	Peningkatan Kapasitas SDM Satpol PP dan Satlinmas termasuk dalam pelaksanaan tugas Hak Asasi Manusia	0	orang	0	0	orang	0	0	orang	-	0	orang	0	0	orang	-	0	orang	-	0	orang	-	0,00	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	Peningkatan kapasitas SDM satuan polisi pamong praja melalui penddidikan dan pelatihan dasar pol pp fungsional pol pp dan uji kopetensi penjabat fungsional	3	orang	-	0	orang	0	0	orang	-	0	orang	0	0	orang	-	0	orang	-	0	orang	-	0,00	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
					I			II			III			IV												
1	4	8			9			10			11			12			13			14=7+13			15=14/6		16
		K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	
	Peningkatan kapasitas SDM Pol PP melalui uji kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional pol pp promosi dan kenaikan jenjang jabatan	4	orang	14.460.000	0	orang	0	0	orang	-	0	orang	0	0	orang	-	0	orang	-	0	orang	-	0,00	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	602	orang	-	0	orang	0	0	orang	-	0	orang	0	0	orang	-	0	orang	-	0	orang	-	0,00	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	Peningkatan kapasitas SDM satuan polisi pamong praja dan satlinmas melalui pelatihan teknis Satpol PP dan SATLINMAS	1	orang	-	0	orang	0	0	orang	-	0	orang	0	0	orang	-	0	orang	-	0	orang	-	0,00	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	454	Dokumen	1.334.490.350	18	Dokumen	51.097.670	107	Dokumen	308.621.505	158	Dokumen	457.084.580	169	Dokumen	487.008.460	452	Dokumen	1.303.812.215	1082 3	Dokumen	2.602.812.890	2254 7,92	78,52	Satuan Polisi Pamong Praja
	Pengadaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	Unit	119.829.000	0	Unit	0	0	Unit	-	1	Unit	12.378.000	1	Unit	101.920.197	1	Unit	114.298.197	1	Unit	114.298.197	100,00	150,39	Satuan Polisi Pamong Praja
	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	11	Dokumen	3.500.000	0	Dokumen	0	11	Dokumen	2.900.000	0	Dokumen	299.000	0	Dokumen	-	11	Dokumen	3.199.000	21	Dokumen	5.166.000	190,91	21,09	Satuan Polisi Pamong Praja
	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	25	Laporan	2.500.000	0	Laporan	0	0	Laporan	-	0	Laporan	0	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0,00	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja
3	**Penegakan Peraturan Daerah kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	**99**	**Laporan**	**974.914.650**	**15**	**Laporan**	**12.975.000**		**Laporan**	**87.876.000**	**27**	**Laporan**	**583.566.450**	**30**	**Laporan**	**273.737.972**	**95**	**Laporan**	**958.155.422**	158	**Laporan**	2.507.715.379	**207,89**	**430,14**	**Satuan Polisi Pamong Praja**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
					I			II			III			IV										
1	4	8			9			10			11			12	13			14=7+13			15=14/6		16
		K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	5	Laporan	332.041.850	0	Laporan	0	0	Laporan	-	3	Laporan	220.211.200	2	Laporan	98.358.000	5	Laporan	318.569.200	10	Laporan	917.129.200	50,00	384,55	Satuan Polisi Pamong Praja
	Pembinaan dan penyuluhan terhadap pelangar peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	2	Laporan	5.060.000	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	0	2	Laporan	5.040.000	2	Laporan	5.040.000	2	Laporan	5.040.000	25,00	23,55	Satuan Polisi Pamong Praja
	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah	46	Laporan	39.257.800	14	Laporan	9.375.000	8	Laporan	5.250.000	2	Laporan	1.050.000	22	Laporan	23.575.000	46	Laporan	39.250.000	79	Laporan	80.050.000	131,67	130,80	Satuan Polisi Pamong Praja
	Pemberkasan adminitrasi penyidikan oleh PPNS penegak peraturan daerah	2	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	0		Dokumen		0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0,00	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	22	Laporan	588.555.000	1	Laporan	3.600.000	3	Laporan	76.626.000	14	Laporan	358.305.250	4	Laporan	146.764.972	22	Laporan	585.296.222	47	Laporan	1.495.496.179	85,45	2452,44	Satuan Polisi Pamong Praja
	Penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	20	Laporan	10.000.000	0	Laporan	0	12	Laporan	6.000.000	8	Laporan	4.000.000	0	Laporan	-	20	Laporan	10.000.000	20	Laporan	10.000.000	181,82	52,70	Satuan Polisi Pamong Praja
	Dukungan pelaksanaan sidang atas pelanggaran peraturan daerah	2	Laporan	-	0	Laporan	0	0	Laporan	-	0	Laporan	0	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0,00	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota	**11**	**Laporan**	-	**0**	**Laporan**	**0**	**0**	**Laporan**	-	**0**	**Laporan**	**0**	**0**	**Laporan**	-	**0**	**Laporan**	**0**	2	**Laporan**	820.000	**10,53**	**0,54**	**Satuan Polisi Pamong Praja**
	Pembentukan sekretariat PPNS	3	Dokumen	-	0	Dokumen	0	0	Dokumen	-	0	Dokumen	0		Dokumen		0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0,00	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah	3	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	-	0	Dokumen	0		Dokumen		0	Dokumen	-	2	Dokumen	820.000	50,00	2,38	Satuan Polisi Pamong Praja
	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	1	Laporan	-	0	Laporan	0	0	Laporan	-	0	Laporan	0		Laporan		0	Laporan	-	0	Laporan	-	0,00	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
					I			II			III			IV										
1	4	8			9			10			11			12	13			14=7+13			15=14/6		16
		K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	
	Dukungan Operasional sekretariat PPNS	2	Laporan	-	0	Laporan	0		Laporan	-	0	Laporan	0		Laporan	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0,00	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	2	Laporan	-	0	Laporan	0		Laporan	-	0	Laporan	0		Laporan	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0,00	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja